



### MULTIKULTURALISME SEBAGAI ETIKA PENDIDIKAN: Kajian Filosofis Atas Krisis Toleransi Generasi Digital

Abdul Khobir<sup>1</sup>, Najwa Fitriani<sup>2</sup>, Aulia Cantika Bella<sup>3</sup>, Afi Mafiroh<sup>4</sup>,  
Nasywa Talita Safrida<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid<sup>1,2,3,4,5</sup>

abdul.khobir@uingusdur.ac.id<sup>1</sup>, najwa.fitriani25033@mhs.uingusdur.ac.id<sup>2</sup>,

aulia.cantika.bella25155@mhs.uingusdur.ac.id<sup>3</sup>, afi.mafiroh25170@mhs.uingusdur.ac.id<sup>4</sup>,

nasywatalita82@gmail.com<sup>5</sup>

#### **Keywords:**

Multiculturalism,  
Educational  
Ethics, the Crisis of  
Tolerance

Accepted: 16-06-2026

Revised: 29-09-2026

Approved: 30-09-2026

#### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the crisis of tolerance among the digital generation from the perspective of the philosophy of education and to examine the relevance of multiculturalism as an ethical foundation for education in addressing the challenges of the digital age. The study employs a library research method with a qualitative approach and philosophical methods (conceptual analysis and interpretation), involving a review of various books, scientific journals, and relevant academic sources. The analysis is conducted descriptively and interpretatively to identify key concepts and construct an argumentative synthesis regarding the relationship between multicultural education and the formation of tolerant attitudes. The findings indicate that the rise of intolerance in digital spaces is not only influenced by technological advancements and social media but also by the insufficient internalization of ethical values in education. Education that remains focused on cognitive aspects is deemed insufficient in fostering students' moral awareness when confronting diversity. Therefore, multiculturalism needs to be reconstructed as an educational ethic that serves as the foundation for curriculum development, school culture, and teaching practices. The integration of digital literacy and multicultural values through dialogue, empathy, and respect for differences is expected to foster a tolerant, inclusive, and civilized generation in the digital age.*

#### **Kata Kunci:**

Multikulturalisme,  
Etika Pendidikan,  
Krisis Toleransi

diterima: 16-06-2026

direvisi: 29-09-2026

disetujui: 30-09-2026

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis krisis toleransi pada generasi digital melalui perspektif filsafat pendidikan serta menelaah relevansi multikulturalisme sebagai landasan etika pendidikan dalam menghadapi tantangan era digital. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode filosofis (analisis konseptual dan interpretasi) melalui penelaahan berbagai buku, jurnal ilmiah, dan sumber akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama serta menyusun sintesis argumentatif mengenai hubungan antara pendidikan multikultural dan pembentukan sikap toleran. Hasil kajian menunjukkan bahwa meningkatnya intoleransi di ruang digital tidak hanya dipengaruhi

---

oleh perkembangan teknologi dan media sosial, tetapi juga oleh belum optimalnya internalisasi nilai etis dalam pendidikan. Pendidikan yang masih berorientasi pada aspek kognitif dinilai belum cukup membentuk kesadaran moral peserta didik dalam menghadapi keberagaman. Oleh karena itu, multikulturalisme perlu direkonstruksi sebagai etika pendidikan yang menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum, budaya sekolah, dan praktik pembelajaran. Integrasi antara literasi digital dan nilai-nilai multikultural melalui dialog, empati, serta penghargaan terhadap perbedaan diharapkan mampu membentuk generasi yang toleran, inklusif, dan berkeadaban di era digital.

---

## **I. PENDAHULUAN**

Di tengah perubahan pola interaksi sosial generasi muda, pendidikan multikulturalisme menghadapi tantangan yang semakin kompleks pada era digital. Maraknya penggunaan teknologi informasi dan media digital tidak selalu menghasilkan sikap yang lebih terbuka terhadap keberagaman, tetapi juga berpotensi memunculkan intoleransi, polarisasi sosial, serta melemahnya kemampuan individu dalam menghargai perbedaan. Penelitian Fajarini, Yuliani, dan Kurniawati (2025) menunjukkan bahwa algoritma media sosial berperan dalam membentuk filter bubble dan echo chamber yang memperkuat bias informasi, membatasi paparan terhadap pandangan yang berbeda, serta mendorong munculnya sikap eksklusif di kalangan generasi muda. Temuan tersebut diperkuat oleh Shaira, Nurida, dan Hidayat (2021) yang menjelaskan bahwa dinamika masyarakat digital di Indonesia berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi sosial dan kecenderungan intoleransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran multikultural yang relevan dengan tantangan kehidupan digital sehingga diperlukan pendekatan yang lebih mendasar dalam memahami persoalan toleransi.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku sosial, tetapi juga mencerminkan persoalan filosofis mengenai orientasi dan tujuan pendidikan. Dalam perspektif filsafat pendidikan, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, melainkan sebagai sarana pembentukan manusia yang memiliki kesadaran moral, kemampuan berpikir kritis, dan penghargaan terhadap keberagaman. Ibrahim (2013) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang menanamkan nilai penghormatan terhadap perbedaan dan membangun kehidupan yang demokratis. Sejalan dengan itu, Zakiah (2018) menegaskan bahwa pendidikan multikultural dalam perspektif filsafat harus diarahkan pada pembentukan sikap toleransi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ulum dan Warliah (2024) juga menunjukkan bahwa filsafat pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik di era digital melalui penguatan nilai moral dan refleksi kritis. Dengan demikian, multikulturalisme perlu dipahami bukan sekadar materi pembelajaran, tetapi sebagai etika pendidikan yang menjadi fondasi pembentukan karakter generasi digital.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pendidikan multikultural dari sudut pandang implementasi pembelajaran dan penguatan karakter. Hakim dan Darajat (2023) menunjukkan bahwa pendidikan multikultural berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan identitas nasional peserta didik. Saputra dan Parisu (2025) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural berpengaruh

terhadap pembentukan perilaku sosial yang lebih inklusif dan terbuka terhadap keberagaman. Azzahra dan Rosyidah (2024) juga menemukan bahwa pendidikan multikultural menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi tantangan intoleransi di era digital. Namun, penelitian-penelitian tersebut menempatkan pendidikan multikultural sebagai pendekatan pedagogis dan belum secara khusus mengkajinya sebagai etika pendidikan melalui perspektif filosofis dalam konteks krisis toleransi generasi digital. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis multikulturalisme sebagai etika pendidikan melalui telaah filosofis terhadap krisis toleransi generasi digital serta merumuskan implikasinya bagi penguatan praktik pendidikan di era digital.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan filosofis-kualitatif untuk mengkaji multikulturalisme sebagai etika pendidikan dalam menghadapi krisis toleransi generasi digital. Fokus kajian meliputi konsep multikulturalisme dalam pendidikan, etika pendidikan sebagai landasan pembentukan sikap toleran, serta fenomena krisis toleransi yang muncul di kalangan generasi digital. Metode ini dipilih karena penelitian berorientasi pada analisis konsep, nilai, dan pemikiran filosofis yang telah dikembangkan dalam berbagai literatur ilmiah sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan. Data diperoleh melalui penelaahan buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber akademik lain yang relevan dengan tema penelitian, kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitasnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretatif melalui identifikasi konsep-konsep utama, pengkajian pemikiran para ahli, serta penyusunan sintesis dan argumentasi filosofis mengenai relevansi multikulturalisme sebagai etika pendidikan dalam membangun sikap toleransi di tengah tantangan era digital.

## **III. PEMBAHASAN**

### **3.1 Konsep Pendidikan Multikultural**

#### **3.1.1. Definisi Pendidikan Multikultural**

Pendidikan multikultural pada dasarnya lahir dari kesadaran bahwa masyarakat modern ditandai oleh keberagaman yang semakin kompleks. Dalam konteks Indonesia, keberagaman tersebut tidak hanya mencakup perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, tetapi juga perbedaan sosial, ekonomi, serta pola pikir yang berkembang akibat globalisasi. Oleh karena itu, pendidikan dituntut untuk tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengelola keberagaman secara konstruktif. Hakim dan Darajat (2023) menekankan bahwa pendidikan multikultural berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter dan identitas nasional melalui internalisasi nilai penghargaan terhadap keberagaman. Pandangan ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural memiliki dimensi kebangsaan yang kuat karena berupaya menjaga persatuan di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Sementara itu, Saputra dan Parisu (2025) memandang pendidikan multikultural sebagai instrumen pembentukan perilaku sosial yang inklusif melalui pengembangan empati, toleransi, dan solidaritas sosial. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya berkaitan dengan aspek pendidikan formal, tetapi juga menyentuh proses pembentukan hubungan sosial yang harmonis.

Jika dianalisis lebih mendalam, terdapat benang merah yang menghubungkan kedua penelitian tersebut, yaitu bahwa pendidikan multikultural berorientasi pada transformasi sosial. Pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang memahami keberagaman, tetapi juga individu yang mampu berinteraksi secara positif dengan kelompok lain. Dengan kata lain, pendidikan multikultural berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjembatani perbedaan dan mencegah munculnya konflik yang disebabkan oleh prasangka maupun stereotip. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan pendidikan multikultural sebagai pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter peserta didik. Kajian mengenai bagaimana pendidikan multikultural dapat berfungsi sebagai strategi menghadapi dinamika sosial pada era digital masih relatif terbatas. Padahal, perubahan pola komunikasi yang dipengaruhi teknologi telah mengubah cara individu memahami dan merespons keberagaman. Oleh karena itu, pendidikan multikultural perlu dipahami tidak hanya sebagai konsep pedagogis, tetapi juga sebagai strategi sosial yang relevan dengan perkembangan masyarakat digital.

### **3.1.2. Tujuan Pendidikan Multikultural**

Tujuan pendidikan multikultural pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis. Hakim dan Darajat (2023) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural bertujuan menumbuhkan toleransi, empati, kerja sama, dan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia. Sementara itu, Ariyah dan Ismaili (2025) menegaskan bahwa pendidikan multikultural bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman sehingga peserta didik mampu beradaptasi dalam masyarakat global yang semakin kompleks. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa tujuan pendidikan multikultural tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial. Pada tingkat individu, pendidikan multikultural berupaya membentuk kesadaran mengenai pentingnya menghargai perbedaan. Pada tingkat sosial, pendidikan multikultural berfungsi menciptakan kondisi yang memungkinkan terbangunnya hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam.

Analisis terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa tujuan pendidikan multikultural dapat dipahami dalam tiga dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah dimensi kognitif yang berorientasi pada peningkatan pemahaman mengenai keberagaman. Dimensi kedua adalah dimensi afektif yang menekankan pembentukan sikap toleran dan empatik. Dimensi ketiga adalah dimensi sosial yang berfokus pada kemampuan membangun kerja sama dan solidaritas sosial. Ketiga dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan pendidikan multikultural bergantung pada keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan tindakan sosial. Peserta didik yang memahami keberagaman tetapi tidak memiliki empati berpotensi tetap menunjukkan perilaku diskriminatif. Sebaliknya, empati yang tidak didukung oleh pemahaman yang memadai dapat menghasilkan toleransi yang dangkal. Oleh karena itu, pendidikan multikultural harus dirancang sebagai proses yang menyentuh seluruh aspek perkembangan peserta didik. Dalam konteks generasi digital, tujuan pendidikan multikultural menjadi semakin penting. Kemudahan akses informasi memungkinkan peserta didik berinteraksi dengan berbagai budaya dan perspektif. Akan tetapi, akses tersebut juga membuka peluang munculnya misinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Oleh karena itu, tujuan pendidikan multikultural perlu diperluas tidak

hanya untuk membangun toleransi dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam ruang digital.

### **3.1.3. Prinsip Pendidikan Multikultural**

Prinsip pendidikan multikultural merupakan landasan normatif yang menentukan arah pelaksanaannya. Prinsip penghargaan terhadap keberagaman, kesetaraan, keadilan sosial, keterbukaan, dan demokrasi menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Menurut Saputra dan Parisu (2025), pendidikan multikultural harus mampu menciptakan interaksi sosial yang inklusif melalui pengembangan empati dan solidaritas sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa prinsip pendidikan multikultural tidak berhenti pada pengakuan terhadap keberagaman, tetapi harus diwujudkan dalam praktik sosial yang nyata. Sementara itu, Ariyah dan Ismaili (2025) menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman budaya sebagai fondasi sistem pendidikan yang demokratis.

Jika dikaji lebih lanjut, prinsip-prinsip tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Penghargaan terhadap keberagaman menjadi dasar bagi terciptanya kesetaraan. Kesetaraan kemudian menjadi prasyarat munculnya keadilan sosial. Keadilan sosial akan memperkuat demokrasi karena setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, prinsip-prinsip pendidikan multikultural membentuk suatu sistem nilai yang saling mendukung. Tantangan utama dalam penerapan prinsip tersebut saat ini adalah munculnya fenomena intoleransi digital. Media sosial sering kali menjadi ruang yang memperkuat stereotip dan polarisasi sosial. Oleh karena itu, implementasi prinsip pendidikan multikultural harus mencakup pengembangan literasi digital yang memungkinkan peserta didik menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

## **3.2 Konsep Toleransi dan Kohesi Sosial**

### **3.2.1 Toleransi**

Toleransi merupakan salah satu konsep sentral dalam pendidikan multikultural. Toleransi tidak hanya berarti menerima keberadaan kelompok lain, tetapi juga mengakui hak mereka untuk mempertahankan identitas yang dimiliki. Dalam perspektif pendidikan, toleransi menjadi indikator keberhasilan internalisasi nilai-nilai multikultural. Hakim dan Darajat (2023) menunjukkan bahwa pendidikan multikultural berperan dalam membentuk sikap toleran peserta didik. Temuan tersebut diperkuat oleh Saputra dan Parisu (2025) yang menemukan bahwa pendidikan multikultural dapat meningkatkan empati dan penghormatan terhadap kelompok yang berbeda. Kedua penelitian tersebut menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas antara pendidikan multikultural dan pembentukan toleransi.

Namun demikian, meningkatnya kasus intoleransi di ruang digital menunjukkan bahwa toleransi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan generasi muda. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendidikan multikultural perlu mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual agar nilai-nilai toleransi tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi menjadi bagian dari perilaku sehari-hari.

### **3.2.2 Keberagaman**

Keberagaman merupakan konteks utama yang melatarbelakangi pentingnya pendidikan multikultural. Ariyah dan Ismaili (2025) menjelaskan bahwa masyarakat global yang semakin terhubung menuntut kemampuan untuk

hidup berdampingan dengan individu yang memiliki latar belakang berbeda. Sementara itu, Hakim dan Darajat (2023) memandang keberagaman sebagai kekayaan bangsa yang harus dikelola melalui pendidikan. Sintesis kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberagaman memiliki dua potensi yang berbeda. Di satu sisi, keberagaman dapat menjadi modal sosial yang memperkaya kehidupan masyarakat. Di sisi lain, keberagaman juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak disertai kemampuan untuk menghargai perbedaan. Oleh karena itu, pendidikan multikultural memiliki peran strategis dalam mengubah keberagaman dari potensi konflik menjadi sumber kekuatan sosial.

### **3.2.3 Relasi Sosial**

Relasi sosial merupakan hasil dari interaksi antarindividu dan kelompok dalam kehidupan masyarakat. Relasi sosial yang positif akan menghasilkan kohesi sosial, yaitu kondisi ketika anggota masyarakat memiliki rasa saling percaya, solidaritas, dan tujuan bersama. Menurut Saputra dan Parisu (2025), pendidikan multikultural dapat memperkuat relasi sosial melalui diskusi, kolaborasi lintas budaya, dan refleksi kritis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga kualitas hubungan sosial dalam kelompok. Jika dianalisis secara lebih luas, kohesi sosial merupakan hasil akhir dari proses pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural membentuk toleransi, toleransi memperkuat relasi sosial, dan relasi sosial yang positif menghasilkan kohesi sosial. Hubungan antara ketiga konsep tersebut bersifat saling memengaruhi dan berkelanjutan.

### **3.3 Perspektif Filsafat Pendidikan Rekonstruksionisme dalam Pendidikan Multikultural**

Aliran rekonstruksionisme memandang pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial yang memiliki tanggung jawab untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan pandangan pendidikan tradisional yang lebih menekankan pada pewarisan budaya dan transfer pengetahuan, rekonstruksionisme menempatkan pendidikan sebagai sarana untuk membangun tatanan sosial yang lebih adil, demokratis, dan humanis. Dalam perspektif ini, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menanamkan penghargaan terhadap keberagaman, toleransi, dan kesetaraan, tetapi juga sebagai ruang yang mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi konkret dari gagasan rekonstruksionisme dalam konteks masyarakat yang majemuk. Ariyah dan Ismaili (2025) menjelaskan bahwa pendidikan di era globalisasi harus mampu membentuk individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis, empati sosial, serta keterampilan lintas budaya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pendidikan tidak lagi terbatas pada pencapaian akademik, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern. Pandangan ini selaras dengan prinsip rekonstruksionisme yang menempatkan peserta didik sebagai agen perubahan sosial. Melalui pendidikan multikultural, peserta didik tidak hanya diajak memahami keberagaman, tetapi juga didorong untuk berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis.

Rekonstruksionisme lahir sebagai respons terhadap krisis sosial-ekonomi dan kebudayaan pada awal abad ke-20. George S. Counts (1932), melalui

pertanyaan “*Dare the School Build a New Social Order?*”, menantang sekolah agar tidak sekadar mewarisi tatanan yang ada, tetapi ikut merancang tatanan sosial yang lebih adil. Gagasan ini dirumuskan lebih sistematis oleh Theodore Brameld (1956) sebagai filsafat pendidikan yang berangkat dari diagnosis krisis budaya dan menempatkan pendidikan sebagai kekuatan untuk menata ulang masyarakat secara demokratis.

Secara filosofis, rekonstruksionisme dapat dibaca dalam tiga lapis. Secara ontologis, manusia dan masyarakat dipandang sebagai realitas yang terus berproses dan dapat dibentuk ulang, bukan tatanan final, sehingga peserta didik dipahami sebagai agen perubahan sosial. Secara epistemologis, pengetahuan tidak dipandang netral, tetapi dibangun melalui dialog dan kesepakatan demokratis serta diuji oleh dampaknya bagi pemecahan masalah sosial; pandangan ini berutang pada tradisi progresivisme dan pragmatisme Dewey (1916), yang mengaitkan pendidikan dengan pengalaman bersama dan kehidupan demokratis, meskipun kaum rekonstruksionis menilai tradisi itu perlu diberi arah sosial yang lebih tegas. Secara aksiologis, tujuan pendidikan adalah keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Brameld (1956) menyebut sikap ini sebagai keberpihakan yang dapat dipertanggungjawabkan (*defensible partiality*): pendidik terbuka tentang nilai yang dianutnya sambil tetap membuka ruang kritik.

Kedekatan rekonstruksionisme dengan pendidikan multikultural tampak pada pedagogi kritis. Freire (1970/2000) menegaskan bahwa pendidikan yang membebaskan menuntut kesadaran kritis (*conscientização*) untuk membaca struktur ketidakadilan dan bertindak mengubahnya, berbeda dari pendidikan “gaya bank” yang memperlakukan peserta didik sebagai wadah pasif. Dalam pendidikan multikultural, Banks (2019) membedakan pendekatan kurikulum dari tingkat kontribusi dan aditif hingga tingkat transformasi dan aksi sosial; dua tingkat terakhir bersesuaian dengan cita rekonstruksionisme karena mengajak peserta didik menganalisis isu keadilan dan mengambil tindakan. Di Indonesia, Tilaar (2004) menekankan bahwa multikulturalisme merupakan tantangan transformasi pendidikan nasional, bukan sekadar penambahan materi budaya.

Meski demikian, rekonstruksionisme memunculkan pertanyaan kritis. Pertama, orientasinya pada perubahan sosial berpotensi bergeser menjadi indoktrinasi apabila pendidik memaksakan visi tatanan ideal tanpa dialog. Kedua, di ruang digital, “rekonstruksi” tidak hanya berlangsung melalui sekolah; algoritma platform ikut membentuk struktur informasi dan identitas peserta didik, sehingga sekolah bukan lagi satu-satunya agen rekonstruksi. Karena itu, multikulturalisme sebagai etika pendidikan perlu dipahami sebagai etika yang menyeimbangkan keberpihakan pada keadilan dengan penghormatan terhadap otonomi dan kebebasan berpikir peserta didik.

### **3.4 Generasi Digital dan Tantangan Pendidikan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan generasi digital, yaitu generasi yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh internet, media sosial, dan berbagai perangkat digital. Generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, terutama dalam cara memperoleh informasi, berkomunikasi, serta membangun relasi sosial. Akses informasi yang cepat dan tidak terbatas memberikan berbagai peluang bagi peningkatan kualitas pendidikan, namun pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan baru yang tidak dapat

diabaikan. Ulum dan Warliah (2024) menemukan bahwa perkembangan teknologi digital telah memunculkan berbagai persoalan sosial seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, individualisme, kecanduan media sosial, serta menurunnya kualitas interaksi sosial peserta didik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan perkembangan kemampuan sosial dan moral generasi muda. Sementara itu, Fitri dan Wahyuningsih menegaskan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat meningkatkan intoleransi, diskriminasi, radikalisme, serta konflik sosial di kalangan generasi muda. Kedua penelitian tersebut menunjukkan keterkaitan yang kuat antara pendidikan multikultural dan pembentukan toleransi.

Jika disintesis, hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama pendidikan pada era digital bukan terletak pada keterbatasan akses informasi, melainkan pada kemampuan peserta didik dalam menyaring, memahami, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Generasi digital memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai pandangan dan ideologi, tetapi tidak semua informasi yang mereka terima mengandung nilai-nilai yang positif. Akibatnya, peserta didik berpotensi terpapar pada berbagai bentuk ujaran kebencian, stereotip, maupun narasi intoleran yang dapat memengaruhi cara mereka memandang kelompok lain.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara tantangan generasi digital dan pentingnya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural tidak hanya berfungsi untuk mengenalkan keberagaman budaya, tetapi juga membekali peserta didik dengan kemampuan untuk memahami perbedaan secara kritis dan konstruktif. Dalam konteks ruang digital, kemampuan tersebut menjadi sangat penting karena interaksi sosial tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik dapat berkomunikasi dengan individu dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan negara yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan menghargai keberagaman menjadi kompetensi yang sangat diperlukan dalam kehidupan abad ke-21.

Jika dikaitkan dengan konsep toleransi dan kohesi sosial yang telah dibahas sebelumnya, perkembangan teknologi digital memiliki pengaruh yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, teknologi dapat memperluas wawasan peserta didik mengenai keberagaman budaya dan memperkuat interaksi lintas kelompok. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat memperkuat polarisasi sosial melalui penyebaran informasi yang bersifat provokatif dan diskriminatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi bukanlah faktor yang secara otomatis menghasilkan kohesi sosial. Kohesi sosial hanya dapat terwujud apabila penggunaan teknologi disertai dengan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam perspektif rekonstruksionisme, tantangan generasi digital harus dipandang sebagai persoalan sosial yang perlu direspons melalui pendidikan. Rekonstruksionisme menekankan bahwa pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul akibat perubahan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dapat diposisikan sebagai strategi rekonstruksi sosial yang relevan untuk menghadapi berbagai dampak negatif perkembangan teknologi.

Analisis terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan sosial generasi digital. Melalui pembelajaran yang menekankan dialog, refleksi kritis,

kerja sama lintas budaya, dan penghargaan terhadap keberagaman, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi secara positif baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mampu memperkuat kohesi sosial di tengah meningkatnya kompleksitas hubungan sosial pada era digital. Berdasarkan sintesis berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan generasi digital tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan literasi teknologi. Diperlukan pendekatan pendidikan yang mampu mengintegrasikan literasi digital dengan nilai-nilai kemanusiaan dan multikulturalisme. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural yang berlandaskan filsafat rekonstruksionisme menjadi relevan karena tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan memiliki kohesi sosial yang kuat di era digital.

### **3.5 Fenomena Krisis Toleransi pada Generasi Digital**

Krisis toleransi dapat dipahami sebagai menurunnya kemampuan individu maupun kelompok dalam menerima, menghargai, dan hidup berdampingan dengan perbedaan yang ada di masyarakat. Dalam konteks generasi digital, krisis toleransi muncul ketika interaksi yang berlangsung di ruang digital justru memperkuat sikap eksklusif, prasangka, dan penolakan terhadap kelompok yang berbeda. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak selalu diikuti dengan perkembangan sikap sosial yang inklusif. Kemudahan akses informasi sering kali dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian, diskriminasi, serta narasi yang memicu konflik sosial.

Bentuk-bentuk intoleransi di era digital dapat ditemukan dalam berbagai praktik komunikasi daring, seperti perundungan siber (cyberbullying), ujaran kebencian (hate speech), penyebaran hoaks yang bernuansa SARA, serta penolakan terhadap pandangan yang berbeda. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang digital sering kali menjadi arena pertarungan identitas yang memperkuat sikap intoleran. Generasi muda yang merupakan pengguna aktif media sosial berpotensi terpapar berbagai informasi yang mengandung prasangka dan stereotip terhadap kelompok tertentu.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis toleransi adalah penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan kemampuan literasi digital dan literasi multikultural yang memadai. Algoritma media sosial cenderung menampilkan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna sehingga membentuk fenomena echo chamber, yaitu kondisi ketika individu hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya sendiri. Kondisi ini kemudian memunculkan polarisasi sosial karena pengguna semakin sulit memahami perspektif yang berbeda. Selain itu, rendahnya literasi multikultural menyebabkan generasi digital kurang memiliki kemampuan untuk memahami keberagaman budaya, agama, maupun pandangan hidup yang ada dalam masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meningkatnya intensitas penggunaan media sosial memiliki hubungan dengan meningkatnya penyebaran intoleransi dan polarisasi sosial. Penelitian juga menemukan bahwa pendidikan multikultural memiliki peran penting dalam membangun sikap saling menghormati, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Oleh karena itu, literatur yang ada menunjukkan bahwa krisis toleransi generasi digital bukan

hanya persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman dalam proses pendidikan.

### **3.6 Multikulturalisme Sebagai Landasan Etika Pendidikan**

Multikulturalisme merupakan pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, bahasa, serta identitas sosial sebagai realitas yang harus diterima dan dihormati. Dalam perspektif pendidikan, multikulturalisme tidak hanya dipahami sebagai keberadaan berbagai kelompok yang berbeda, tetapi juga sebagai upaya membangun hubungan yang adil dan setara di antara kelompok-kelompok tersebut. Dengan demikian, multikulturalisme menjadi dasar penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan demokratis.

Etika pendidikan merupakan seperangkat nilai moral yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Etika pendidikan bertujuan membentuk peserta didik agar tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter yang baik, sikap sosial yang positif, dan kesadaran moral dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan yang berlandaskan etika menempatkan manusia sebagai subjek yang harus dihormati martabat dan hak-haknya tanpa memandang latar belakang sosial maupun budaya.

Nilai-nilai utama dalam multikulturalisme meliputi penghargaan terhadap perbedaan, keadilan, kesetaraan, pengakuan terhadap identitas individu dan kelompok, serta sikap saling menghormati. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman. Pendidikan multikultural berupaya menanamkan nilai-nilai tersebut melalui proses pembelajaran yang menekankan dialog, kerja sama, dan penghormatan terhadap berbagai perspektif yang berbeda.

Hubungan antara pendidikan dan pembentukan sikap toleran sangat erat karena pendidikan merupakan sarana utama dalam proses sosialisasi nilai. Melalui pendidikan, peserta didik belajar memahami keberagaman sebagai kekayaan sosial, bukan sebagai ancaman. Pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai multikultural dapat membantu peserta didik mengembangkan empati, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang lain yang berbeda latar belakang. Oleh karena itu, multikulturalisme dapat dijadikan sebagai landasan etika pendidikan dalam menghadapi tantangan krisis toleransi pada generasi digital.

### **3.7 Telaah Filosofis Atas Krisis Toleransi Generasi Digital**

Berdasarkan hasil kajian pustaka, krisis toleransi pada generasi digital menunjukkan bahwa pendidikan yang selama ini dilaksanakan belum sepenuhnya berhasil membentuk karakter toleran pada peserta didik. Meskipun nilai-nilai toleransi telah diajarkan dalam berbagai mata pelajaran, implementasinya sering kali masih bersifat teoritis dan belum menjadi bagian dari kesadaran moral peserta didik. Akibatnya, banyak generasi muda yang memahami konsep toleransi secara kognitif, tetapi belum mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam interaksi di ruang digital.

Dalam perspektif filsafat pendidikan, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui pemikiran bahwa pendidikan tidak cukup hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga harus membentuk karakter dan kebijaksanaan moral.

Pendidikan yang terlalu berorientasi pada pencapaian akademik cenderung mengabaikan dimensi etis dan kemanusiaan. Akibatnya, peserta didik memiliki kemampuan teknologi yang tinggi, tetapi kurang memiliki kemampuan untuk menghargai perbedaan dan mengelola konflik secara konstruktif.

Fenomena intoleransi yang berkembang di media sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai multikultural belum terinternalisasi secara mendalam. Oleh karena itu, multikulturalisme perlu diposisikan bukan hanya sebagai materi ajar yang dipelajari di kelas, melainkan sebagai etika pendidikan yang menjadi dasar seluruh proses pembelajaran. Sebagai etika pendidikan, multikulturalisme berfungsi sebagai pedoman moral yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi keberagaman.

Landasan filosofis multikulturalisme sebagai etika pendidikan dapat diperkuat melalui gagasan politik pengakuan Taylor (1994). Menurut Taylor, identitas dibentuk sebagian oleh pengakuan atau ketiadaan pengakuan dari pihak lain, sehingga pengakuan yang keliru (*misrecognition*) dapat menjadi bentuk penindasan. Dalam ruang digital, prasangka dan ujaran kebencian merupakan bentuk salah-pengakuan yang berulang dan diperbesar oleh algoritma. Karena itu, etika pendidikan multikultural tidak cukup melatih kognisi tentang perbedaan, tetapi perlu membangun disposisi moral untuk mengakui martabat liyan, termasuk ketika berinteraksi secara anonim.

Penulis berpendapat bahwa krisis toleransi generasi digital merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan perkembangan moral. Kemajuan teknologi telah memperluas akses informasi, tetapi belum diimbangi dengan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai multikultural secara lebih sistematis melalui kurikulum, budaya sekolah, serta praktik pembelajaran yang menekankan dialog, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan menjadikan multikulturalisme sebagai etika pendidikan, generasi digital diharapkan tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas, tetapi juga mampu membangun kehidupan sosial yang toleran, inklusif, dan berkeadaban.

#### **IV. SIMPULAN**

Berdasarkan kajian filosofis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa krisis toleransi pada generasi digital tidak semata-mata disebabkan oleh perkembangan teknologi dan media sosial, tetapi lebih mendasar merupakan refleksi dari belum optimalnya pendidikan dalam menginternalisasikan nilai-nilai etis yang mendukung kehidupan multikultural. Pendidikan selama ini cenderung menempatkan multikulturalisme sebagai materi pembelajaran yang bersifat kognitif, sehingga belum mampu membentuk kesadaran moral peserta didik dalam menghadapi keberagaman yang semakin kompleks di ruang digital. Oleh karena itu, multikulturalisme perlu direkonstruksi sebagai etika pendidikan yang menjadi landasan seluruh proses pembelajaran, bukan sekadar tema yang diajarkan dalam kurikulum.

Kajian ini menemukan bahwa penguatan toleransi pada generasi digital memerlukan integrasi antara literasi digital dan literasi multikultural melalui pengembangan dialog, empati, penghargaan terhadap perbedaan, serta kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi. Dalam perspektif filsafat pendidikan rekonstruksionisme, pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran sosial peserta didik agar mampu menjadi agen

perubahan yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan intoleransi di era digital tidak cukup diatasi melalui penguasaan teknologi semata, melainkan harus disertai penguatan dimensi etis dan kemanusiaan dalam pendidikan. Data survei menunjukkan bahwa krisis yang dihadapi generasi digital lebih tepat dipahami sebagai krisis internalisasi, bukan runtuhnya toleransi secara menyeluruh, sehingga penguatan etika pendidikan perlu diarahkan pada pembentukan disposisi moral, dengan tetap menjaga otonomi berpikir peserta didik agar rekonstruksi sosial tidak bergeser menjadi indoktrinasi.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan gagasan multikulturalisme sebagai etika pendidikan yang relevan dengan karakteristik generasi digital. Perspektif ini menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dibandingkan model pendidikan multikultural yang berfokus pada transfer pengetahuan tentang keberagaman. Dengan menjadikan multikulturalisme sebagai fondasi etis dalam kurikulum, budaya sekolah, dan praktik pembelajaran, pendidikan diharapkan mampu membentuk generasi yang tidak hanya cakap memanfaatkan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran moral, sikap toleran, serta kemampuan membangun kohesi sosial di tengah masyarakat yang plural. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji implementasi model pendidikan multikultural berbasis etika ini dalam berbagai jenjang dan konteks pendidikan guna memperkuat relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat digital masa kini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azzahra, F., & Rosyidah, A. N. (2024). Mengatasi tantangan intoleransi dengan pendidikan multikultural di era digitalisasi. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Banks, J. A. (2019). *An Introduction to Multicultural Education* (6th ed.). Pearson.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. New York: Macmillan.
- Fajarini, S. D., Yuliani, F., & Kurniawati, J. (2025). Peran algoritma media sosial dalam membentuk filter bubble dan echo chamber di kalangan Milenial dan Gen Z Kota Bengkulu. *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi*, 6(1), 205–229.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Hakim, A. R., & Darajat, J. (2023). Pendidikan multikultural dalam membentuk karakter dan identitas nasional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 1337–1346. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1470>
- Ibrahim, R. (2008). Pendidikan multikultural: Upaya meminimalisir konflik dalam era pluralitas agama. *el-Tarbawi*, 1(1), 115–127. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol1.iss1.art9>
- Ibrahim, R. (2013). Pendidikan multikultural: Pengertian, prinsip, dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam. *Addin*, 7(1), 129–154. <https://doi.org/10.21043/addin.v7i1.573>
- Khairi, A., & Sapuadi. (2026). Strategi pendidikan multikultural untuk menangkal intoleransi di ruang siber pada Gen-Z. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 232–240.
- Muslim, A. B. (2022). Pengembangan kurikulum PAI berbasis pendidikan multikultural perspektif Islam. *JIEBAR: Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research*, 2(2), 107–117. <https://doi.org/10.33853/jiebar.v2i2.231>

- Novayani, I. (2017). Pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.19109/Tadrib.v3i2.1795>
- Saputra, E. E., & Parisu, C. Z. L. (2025). Perilaku sosial dalam konteks pendidikan multikultural. *Jurnal Konseling dan Psikologi Indonesia*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.58472/konselia.v1i1.9>
- Shaira, R. E., Nurida, T. D., & Hidayat, R. (2021). Populisme dan intoleransi dalam dinamika sosial budaya masyarakat digital Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology Education and Development*, 3(1), 43–52.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Ulum, M. B., & Warliah, W. (2024). Peran filsafat pendidikan dalam pembentukan karakter siswa di era digital. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 30(2). <https://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1530>
- Wungubelen, A. L., & Ismail. (2025). Penerapan filsafat pendidikan terhadap pembentukan karakter siswa di era digital. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 21(1), 97–102. <https://doi.org/10.57216/pah.v21i1.927>
- Zakiah, S. (2018). Pendidikan multikultural di Indonesia: Konsepsi filsafat Islam. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.33477/alt.v3i1.419>